

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa, penilaian maturitas SPIP di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2018 mencapai predikat kategori “terkelola dan terukur” dengan skor 4,0. Tingkat terkelola dan terukur berarti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

#### **5.2. Saran**

1. Dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaran SPIP dari tingkat “terdefinisi” (level 3) ke tingkat “terkelola dan terukur” (level 4), agar melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas konsistensi pelaksanaan konsistensi pelaksanaan kebijakan/ aturan terkait relevansinya;
2. Dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaran SPIP dari tingkat “terkelola dan terukur” (level 4) ke tingkat “optimum” (level 5), agar menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan kebijakan/ aturan terkait dan relevansinya, serta mengembangkan sistem aplikasi secara berkelanjutan yang memungkinkan dilakukannya pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan aturan/ kebijakan terkait.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya**

Data yang diperoleh hanya berupa data sekunder yaitu dokumen-dokumen pendukung yang didapat pada saat melakukan validasi penilaian maturitas SPIP di Kemenlu-RI tahun 2018. Dikarenakan dokumen sekunder tersebut bersifat rahasia, sehingga peneliti tidak bisa memperoleh dan melampirkan dokumen tersebut, hanya sebatas melihat untuk kepentingan validasi kelengkapan dokumen. Jadi, untuk pengembangan penelitian selanjutnya diusahakan memperoleh data primer berupa wawancara dan penyebaran kuisioner COSO kepada pihak-pihak yang berkepentingan di Kemenlu-RI.